

# PERAN BPBD DALAM MITIGASI BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DWI SUCI JAYANTI  
NPP. 29.1170

*Asdaf Provinsi Kalimantan Selatan  
Program Studi  
Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik*

Email:  
[jayantidwisuci@gmail.com](mailto:jayantidwisuci@gmail.com)

## **ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *(Contains the background behind the research disaster risk as a disaster to be more alert in detecting both natural and non-natural disasters so that the potential to avoid is greater and many residents are saved. Mitigation of Forest Fire Disasters in Tanah Laut Regency as an effort to prevent potential natural disasters, namely forest fires.* **objective :** *To find out and analyze the role of BPBD in mitigating forest and land fire disasters in Tanah Laut Regency, South Kalimantan Province.* **Method:** *This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach, where the authors obtain data by means of interviews, observation and documentation* **Result:** *The availability of human resources will continue to be improved in accordance with the competencies required to program and supervise as a form of rights and obligations to detect forest fires early and reduce losses both materially and financially to the people of Tanah Laut Regency by BPBD.* **Conclusion:** *The role of BPBD in forest and land fire disaster mitigation in Tanah Laut Regency, South Kalimantan Province, for employees holding structural positions, it is sufficient to understand what their main duties and functions are in carrying out their roles as part of BPBD Tanah Laut Regency but need to provide skilled human resources. and competent in disaster mitigation. Barriers that come from outside and inside can also be overcome with the efforts made and also supported by several supporting factors.*

**Keywords:** *BPBD; Mitigation; Forest Fires; Tanah Laut Regency*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Resiko bencana sebagai perihai untuk lebih sigap dalam mendeteksi bencana baik alam maupun non alam sehingga potensi untuk menghindari lebih besar dan banyak warga yang tereseleamatkan. Mitigas Bencana Kebakarana Hutan di Kabupaten Tanah Laut sebagai bentuk upaya dalam pencegahan potensi terjadinya bencana alam yakni kebakaran hutan. **Tujuan:** Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran BPBD dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dimana penulis memperoleh data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:.** Ketersediaan SDM tetap ditingkatkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan hingga program serta pengawasan sebagai bentuk hak dan kewajiban untuk mendeteksi lebih dini kejadian kebakaran hutan dan mengurangi kerugian baik secara materiil maupun finansial pada masyarakat Kabupaten Tanah Laut oleh BPBD. **Kesimpulan:** Peran BPBD dalam mitigasi bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk pegawai yang memegang jabatan struktural cukup memahami apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi mereka dalam melaksanakan peran mereka yang menjadi bagian dari BPBD Kabupaten Tanah Laut namun perlu penyediaan SDM yang ahli dan berkompeten dalam mitigasi bencana. Hambatan yang berasal dari luar maupun dalam juga sudah dapat diatasi dengan upaya yang dilakukan dan didukung juga oleh beberapa faktor pendukung.

**Kata Kunci:** BPBD; Mitigasi; Kebakaran Hutan; Kabupaten Tanah Laut



## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia salah satu negara yang paling rentan terhadap kejadian bencana yang diakibatkan oleh letak geografisnya. Bencana yang muncul akan dilakukan kajian pendekatan untuk memperlihatkan dampak negatif yang akan muncul. Bencana yang sering sekali terjadi di Indonesia diakibatkan oleh letak geografis dan astronomis, namun tidak jarang juga diakibatkan oleh kelalaian dan kegiatan manusia sendiri. Potensi dampak negatif akan dihitung tingkat kerentanan serta kapasitas kawasan tersebut. Melalui Resiko bencana dapat diketahui potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana tersebut dengan gambaran kurun waktu tertentu berupa korban jiwa baik secara fisik maupun psikis masyarakat. Adanya bahaya pada suatu kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya kerugian secara materil maupun korban. Bahaya akan dianggap sebagai bencana (disaster) ketika timbulnya korban dan kerugian. Pada kerentanan menentukan kondisi bahaya yang akan terjadi akan timbul atau tidak. Selanjutnya kapasitas sebagai tanggapan terhadap situasi yang tersedia berupa kondisi masyarakat, keuangan dan kondisi sumber daya lainnya.

Dari rumusan tersebut kita dapat mengetahui resiko dan dampak yang akan datang ketika suatu fenomena bencana terjadi. Pertama kita perlu memahami bahaya di lapangan kemudian kita analisis untuk mengenali bahaya dan resiko seberapa besar kemungkinan masalah yang akan ditimbulkan sebagai besaran derajat konsekuensi. Kasus kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu fenomena yang menjadi permasalahan di tahun 2021 . Dari penjelasan tabel tersebut dapat diketahui luas lahan yang terkena dampak fenomena bencana kebakaran hutan dan lahan paling luas terkena dampak dari kebakaran hutan dan lahan terdapat di wilayah Kecamatan Bati-bati dengan luas lahan terbakar 479,48 Ha sehingga masyarakat perlu di evakuasi dan dipindahkan ke tempat pengungsian Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan kejadian kasus jenis bencana alam paling sering terjadi dibandingkan dengan jenis bencana alam lainnya seperti angin puting beliung, kekeringan, gelombang pasang dan abrasi.

Bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut cukup tinggi mengingat Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah yang terdiri dari 11 kecamatan. Terutama di lima kecamatan yaitu Tambang Ulang, Bati-Bati, Jorong, Kurau, dan Kintap dianggap sebagai daerah yang memiliki potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Mitigasi sebagai fokus penelitian

yang merupakan bagian tahap pra- bencana sebagai salah satu tugas yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Tanah Laut.

Mitigasi bencana merupakan upaya untuk meminimalisir risiko bencana, melalui pembangunan secara fisik infrastruktur maupun pemberian sosialisasi pemahaman kesadaran dalam menghadapi ancaman bencana. Bencana dapat ditimbulkan dari faktor alam, non alam dan ulah manusia sendiri. Dalam pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut menerbitkan suatu peran yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh BPBD sesuai dengan wewenang dari BPBD. Peneliti melihat perlu adanya penelitian yang merujuk pada pelaksanaan peran mitigasi bencana dengan berbagai fenomena yang terjadi maka penelitian ini akan dituangkan melalui penulisan sebuah skripsi dengan judul **“PERAN BPBD DALAM MITIGASI BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN”**.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Resiko bencana sebagai perihai untuk lebih sigap dalam mendeteksi bencana baik alam maupun non alam sehingga potensi untuk menghindari lebih besar dan banyak warga yang tereselematkan. Mitigas Bencana Kebakarana Hutan di Kabupaten Tanah Laut sebagai bentuk upaya dalam pencegahan potensi terjadinya bencana alam yakni kebakaran hutan.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Pertama, Eko Prasetyo Karyono (2019) , berjudul “Politik Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni berhasilnya pelaksanaan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan, Bupati Kabupaten Siak mengeluarkan Peraturan.

Kedua, Khulfi M Khalwani(2015), dkk yang berjudul “Nilai Kerugian Dan Efektivitas Pencegahan Kebakaran Hutan Gambut ”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masih kurang sinergis dan optimal dalam kerjasama. Upaya untuk meningkatkan sinergisitas sebaiknya dikaji kembali secara komprehensif.

Ketiga, Rosmayani Noor Latifah dan Adjie Pamungkas (2013), dkk yang berjudul “Identifikasi Faktor-Faktor Kerentanan Terhadap Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas dikatakan reliable apabila nilai  $> 0.6$  dan untuk mengetahui faktor tersebut valid atau tidak maka nilai pada corrected item-total correlation di item total statistics bernilai  $>0.3$  kriteria ini merupakan kriteria uji validitas secara singkat (rule of thumb).

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi diLokus Penulis.

#### **1.5 Tujuan**

Berdasarkan judul dari penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran BPBD dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung peran BPBD dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Untuk mengetahui upaya apasaja yang dilakukan oleh BPBD dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

## **II. METODE**

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sebab peneliti fokus dalam menggambarkan peristiwa yang terjadi dilapangan secara sistematis, logis, objektif dan benar-benar terjadi, agar dapat dipahami setiap fakta yang terjadi guna mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang terjadi.

Menurut sugiyono (2014:137) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai seting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Apabila dilihat dari setingnya, data dapat dikumpulkan pada seting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, disekolah dengan tenaga pendidik dan kependidikan, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar,

diskusi, dijalan dan lain-lain”. Berdasarkan data tersebut, tentunya data yang diperoleh haruslah sesuai dengan fakta sehingga dapat menjadi referensi yang akan menimbulkan beberapa klasifikasi data.

Sugiyono (2014:62) mengemukakan bahwa, “setiap peneliti harus dapat menyajikan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara kuesioner (angket) atau dokumen”. Prinsip dasar penyajian data adalah komunikasi dan kelengkapan, dalam artian data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan dengan mudah memahami isinya. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dari skor jawaban masyarakat dan data kualitatif dari jawaban wawancara.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Peran BPBD Dalam Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanah Laut**

Kedudukan BPBD dalam pemerintahan adalah sebagai pelaku koordinasi berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta wawancara yang dilakukan Bersama dengan kepala pelaksana BPBD Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan wawancara berdama Kepala BPBD Kabuapten Tanah Laut yakni Ir. Saharudin, perang terdapat aspek dinamis secara teoritis yakni adanya adaptasi diri fungsi dan keseluruhan proses, adanya interaksi dan perilaku elemen dalam kegiatannya. Peran sebagai bentuk kedudukan dalam menjalankan hak dan kewajibannya khususnya apda BPBD dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut. Dilakukan secara procedural dimulai dari pengumpulan informasi dengan koordinasi berbagai pihak sebagai bentuk hak dalam menjalankan peran higga dapat mengeksuksi pada tahap pasca bencana sebagai bentuk kewajiban dari peran yang dijalankan oleh BPBD.

##### **A. Hak BPBD Dalam Mitigasi Bencanca Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanah Laut**

BPBP sebagai badan yang independen dalam pengurusan bencana baik alam maupun non alam sepatutnya diberikan wewenang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan. Dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut memerlukan hak-hak secara legal (*privileges*) yang diprioritaskan pada ketersediaan SDM pada kualitas dan ketersediaan anggota atau cenderung kuantitas yang dimiliki untuk menjangkau titik bencana dan pengkoordinasian mitigasi bencana.

## 1. **Ketersediaan SDM**

Ketersediaan SDM sendiri untuk BPBP berdasarkan tabel 4.4 dengan jumlah pegawai tetap sebanyak 15 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) 38 orang. Pegawai tetap yang didominasi golongan II sebanyak 11 dan golongan tertinggi yakni golongan IV dengan kepangkatan Pembina Tk. I sebanyak satu yakni Kepala BPBD yakni Ir. Saharudin dengan pendidikan terakhir Strata atau Sarjana. kompetensi dari ASN yang ada di BPBD sendiri belum mencapai target yang diharapkan sehingga harus melibatkan swasta dengan relawan sebagai pelaku utama untuk siap siaga terhadap bencana yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut. sebagai sampel bahwa tiap pegawai sebagai dari SDM BPBD Kabupaten Tanah Laut untuk hal yang dasar mengenai tugas pokok dan fungsi mereka paham dan mengerti sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam melayani masyarakat terutama dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut.

## 2. **Ketersediaan Anggaran**

Program yang dianggarkan sebesar Rp 2,713,597,969.00 dibutuhkan untuk anggaran belanja langsung dan program beserta kegiatannya. Di Tahun 2022, meningkat menjadi 3.428.832.639,00 dengan kenaikan sebesar 26 %. kejadian bencana di Kabupaten Tanah Laut untuk periode 5 tahun terakhir (2017-2021) yang di dominasi dengan kebakaran hutan hingga putting beliung. ketersediaan anggaran untuk BPBD dalam menjalankan perannya dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut harus melibatkan personil tambahan meninjau kurangnya ketersediaan anggaran dalam perekrutan anggota serta peralatan sehingga pelaksanaan kewajiban mereka dari hak yang dimiliki dapat berjalan secara maksimal.

## B. **Kewajiban BPBD Dalam Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanah Laut**

Kewajiban sebagai tanggung jawab dan tanggung gugat yang diemban oleh BPBD Kabupaten yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Kabupaten Tanah Laut terutama dalam melakukan penanggulangan bencana yang merujuk pada mitigasi fisik dan non-fisik. Kepala BPBD Kabupaten Tanah Laut menyampaikan, Adanya penegasan bahwa BPBD sungguh dalam melaksanakan kewajibannya sebagai badan yang mengurus bagian bencana melalui mitigasi bencana khususnya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut.

## 1. **Program**

Program yang selama ini dilaksanakan guna menyukseskan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut sudah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Tanah Laut. 3 program mitigasi bencana yang dilaksanakan oleh BPBD adalah pembuatan pengumuman tanda peringatan bahaya, ketersediaan Unit Cegah Siaga dan dilaksanakannya kajian bencana. erkait urusan pemerintahan yakni Urusan Wajib Pelayanan .Dasar Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dengan program pencegahan dan penanggulangan bencana dengan rincian kegiatan pencegahan dan pengendalian resiko bencana memiliki capaian program meninjau dari target indeks kepuasan dalam wawancara yang dilakukan menuturkan mitigasi sebagai salah satu progam yang ditujukan untuk siap siaga terhadap konsekuen kegiatan masyarakat yang melakukan pembakaran hutan dalam rangka pembukaan lahan,

## 2. **Koordinasi**

Dilakukan koordinasi sebagai bagian dari langkah untuk menjalankan kewajiban BPBD Kabupaten Tanah dalam mencegah bencana alam yang terjadi yakni kebakaran hutan. Koordinasi yang dilakukan untuk mengurangi kesalahan teknis di lapangan. Wujud dari koordinasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tanah Laut adalah dengan melaukan koordinasi secara kewilayahan Bersama kecamatan hingga tingkat kelurahan. Oleh karena itu, penegasan dari Kepala BPBD Kabupaten Tanah Laut sendiri menyampaikan hal ini dilakukan untuk bisa merasakan dampak dari setiap rangkaian bencana pasi dalam lingkup kecil dapat terdeteksi secara dini.

## 3. **Sosialisasi**

Kepala BPBD melibatkan beberapa warga setempat untuk aktif berpartisipasi dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut. Melalui sosialiasi untuk diberikan pembekalan kepada warga setempat. Selain itu dilakukan juga pembinaan terkhusus pada anggota yang terjun langsung ke lapangan dengan melaksanakan kegiatan latihan rutin sebelum direkrut sebagai anggota BPBD ditambah mengikuti kegiatan pelatihan secara teknikal.

## 4. **Pengawasan**

BPBD dalam menjalankan perannya sebagai langkah untuk menentukan kinerja dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang tepat guna untuk mencapai hasil yang sebagaimana diharapkan dalam program mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut. Dari BPBD Kabupaten Tanah Laut menyampaikan data melalui Indeks

Resiko Bencana Indonesia pada tahun 2020, terkhusus pada Provinsi Kalimantan Selatan memiliki indeks risiko sebesar 144,81 dalam kategori tinggi dengan nomor urut 70 untuk Kabupaten Tanah Laut mencapai skor 178.00.

## 5. **Penindakan**

Penindakan atau Realisasi dari peran BPBD dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut yakni melibatkan tiga pilar pemerintah yakni bersama TNI-Polri. Dengan melibatkan aparatur yang ada sehingga wujud realisasi yang dirasakan semakin berdampak dan sigap pada titik-titik bencana di Kabupaten Tanah Laut. Peran BPBD menjadi maksimal dalam menjalankan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut dengan wujudnya melalui pemantauan secara langsung dari helikopter yang dimiliki oleh BPBD dengan anggota yang terjun melibatkan Manggala Agni.

### 3.2 **Faktor Pendukung dan Penghambat Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanah Laut**

Dalam pelaksanaan peran BPBD pada mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat sebagai bagian dari pelaksanaan mitigasi tersebut. Faktor pendukung dari pelaksanaan BPBD pada mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut yaitu koordinasi yang baik dari berbagai *stakeholder* dalam partisipasi mitigasi ini. Keterlibatan Polri- TNI melalui sinergitasnya dengan Manggala Agni sehingga responsive dalam siap siaga pada titik lokasi yang cenderung berpotensi terkena bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut. Hal ini jelas disampaikan oleh Kepala BPBD Kabupaten Tanah Laut bahwa, menunjukkan keberhasilan kolaborasi beberapa aparatur mendapatkan penghargaan sebagai bukti konkret hal ini sebagai faktor pendukung dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut.

Keterbatasan sumber daya baik dari peralatan hingga SDM selalu menjadi alasan klasik dan nomor satu di setiap daerah termasuk Kabupaten Tanah Laut dalam urusan BPBD dalam pada perannya di mitigasi bencana kebakaran dan lahan. Kepala BPBD menjelaskan untuk kurangnya operasional kantor yang masih bersandar pada BNPB Pusat yang mengedepankan keamanan. Ditegaskan pernyataan keterbatasan sumber daya yang disampaikan oleh PLT. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan yakni adanya kendala pada kelengkapan peralatan maupun SDM yang dimiliki terutama anggota lapangan. Untuk cuaca yang tidak mendukung yang disampaikan

anggota Manggala Agni Kabupaten Tanah Laut menjadi faktor penghambat, hal ini dapat teratasi apabila keterbatasan sumber daya telah teratasi terlebih dahulu.

### **3.3 Upaya BPBD dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan Lahan di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan**

1. Sosialisasi bagi Karang Taruna tanggap Bencana dan pandemi Covid-19.

BPBD Kabupaten Tanah Laut memperhatikan masyarakat Kabupaten memiliki potensi untuk tanggap darurat bencana khusus anak-anak muda yang cenderung dalam masanya yang aktif dan memiliki rasa tahu yang tinggi. Melibatkan karang taruna setempat.

2. Pengalokasian anggaran dalam melaksanakan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut.

BPBD membutuhkan anggaran yang besar terkait kebutuhan kantor atau operasional meninjau bencana yang terjadi yakni kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut selalu ada yang disebabkan pembukaan lahan bebas.

3. Memperlibatkan pihak lain dalam penanggulangan pra- bencana sebagai bentuk mitigasi bencana.

Adanya keterlibatan dengan pihak lain dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut sebagai bentuk upaya mensukseskan giat mitigasi tersebut.

### **3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Eko Prasetyo Karyono (2019) , berjudul “Politik Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan”. Adapun temuan hasil penelitiannya yakni berhasilnya pelaksanaan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan, Bupati Kabupaten Siak mengeluarkan Peraturan. Khulfi M Khalwani(2015), dkk yang berjudul “Nilai Kerugian Dan Efektivitas Pencegahan Kebakaran Hutan Gambut”. Adapun temuan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masih kurang sinergis dan optimal dalam kerjasama. Upaya untuk meningkatkan sinergisitas sebaiknya dikaji kembali secara komprehensif.

Rosmayani Noor Latifah dan Adjie Pamungkas (2013), dkk yang berjudul “Identifikasi Faktor-Faktor Kerentanan Terhadap Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru”. Adapun temuan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan

uji validitas dan reliabilitas dikatakan reliable apabila nilai  $> 0.6$  dan untuk mengetahui faktor tersebut valid atau tidak maka nilai pada corrected item-total correlation di item total statistics bernilai  $>0.3$  kriteria ini merupakan kriteria uji validitas secara singkat (rule of thumb).

Pembaharuan temuan hasil penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni Peran BPBD dalam mitigasi bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk pegawai yang memegang jabatan struktural cukup memahami apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi mereka dalam melaksanakan peran mereka yang menjadi bagian dari BPBD Kabupaten Tanah Laut namun perlu penyediaan SDM yang ahli dan berkompeten dalam mitigasi bencana. Hambatan yang berasal dari luar maupun dalam juga sudah dapat diatasi dengan upaya yang dilakukan dan didukung juga oleh beberapa faktor pendukung.

#### IV. KESIMPULAN

Peran BPBD dalam menjalankan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan pegawai yang tersedia terkait kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi. Untuk pegawai cukup memahami yang menjadi tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan peran yang menjadi bagian dari BPBD Kabupaten Tanah Laut tetapi bagi anggota lain khususnya pada bagian anggota lapangan hanya memahami secara umum dalam menghadapi mitigasi pada pra-bencana kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh penyerapan pegawai hanya sesuai dengan standar sebagai pemenuhan keanggotaan dan pelatihan bagi anggota lapangan yang hanya dilaksanakan selama 2 bulan yang masih kurang dengan alat perlengkapan yang kurang.

Faktor pendukung dan penghambat dari mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut yakni koordinasi yang baik dari *stakeholder* yang ada untuk menunjang keberhasilan program mitigasi tersebut. Faktor penghambat sendiri yakni keterbatasan sumber daya yang ada baik alat maupun ketersediaan SDM dari BPBD Kabupaten Tanah Laut itu sendiri.

Upaya yang dapat dilakukan oleh BPBD dalam program mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut adalah pengalokasian anggaran dalam melaksanakan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut, dan melibatkan pihak lain dalam penanggulangan pra-bencana sebagai bentuk mitigasi bencana.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada dua kelurahan dan dua desa saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Soekanto saja.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Peran BPBD Dalam Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada Kepala BPBD Di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Badan, Peran, Perencanaan Pembangunan, Daerah Dalam, Rpjmd Kota Tomohon, Syaron Brigette Lantaeda, Florence Daicy J Lengkong, and others, 'Jurnal Administrasi Publik', 04.048 Edition, Fourth, Creswell, Jhon W. 2018. *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*. California. Sage
- Haryanto, Agus, 'Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia', *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, IV no.. II.II (2016), 23  
<<http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/jurnal/prinsip-bebas-aktif-dalam.36>>
- Lahan, Hutan D A N, Hani Syarifah, Diane Tanti Poli, Miftah Ali, Hayatul Khairul Rahmat, and I Dewa Ketut, 'NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial', 7.2 (2020), 398–407
- Manajemen, Jurnal, Start-up Bisnis Volume, Bobie Ronaldo Setiawan, Hendro Susanto, Fakultas Manajemen, Bisnis Universitas, and others, "" PERENCANAAN SUKSESI PADA PERUSAHAAN KELUARGA DI", 2.2014 (2018)
- 'Pardede, Nurhasanah. UPAYA GURU BIMBINGAN DAN KONSELING MENGATASI KESULITAN BELAJAR SISWA SMP NEGERI 7 PADANGSIDIMPUAN. Ristekdik :

Jurnal Bimbingan Dan Konseling.SK No. 0005.25274244/JI.3.1/SK.ISSN/2016.05 - 17  
Mei 2016 (Mulai Edisi Vol. 1, No. 1, Juni 2016’

Pramesti, Dyang Falila, Lahan, M Tanzil Furqon, and Candra Dewi, ‘Pramesti, Dyang Falila.Implementasi Metode K-Medoids Clustering Untuk Pengelompokan Data Potensi Kebakaran Hutan/Lahan Berdasarkan Persebaran Titik Panas (Hotspot).Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer.Vol. 1, No. 9, Juni 2017, Hlm. 72’, *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 1.9 (2017), 723–32 <<https://doi.org/10.1109/EUMC.2008.4751704>>

